

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyarti, A., 2016. *Evaluasi dan Strategi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo)*. Universitas Gadjah Mada.
- Akbar, R., Pilcher, R.A. & Perrin, B., 2015. Implementing performance measurement systems. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 12(1), pp.3–33.
- Akbar, R., Pilcher, R. & Perrin, B., 2012. Performance Measurement in Indonesia: The Case of Local Government. *Pacific Accounting Review*, 24(3), pp.262–291.
- Alchian, A.A., 1950. Uncertainty, Evolution and Economic Theory. *The Journal of Political Economy*, 58(3), pp.211–221.
- Artley, W., 2001. *The Performance-Based Management Handbook Volume 3: Establishing Accountability for Performance*, USA: The Performance-Based Management Special Interest Group (PBM SIG).
- Ashworth, R., Boyne, G. & Delbridge, R., 2009. Escape from the iron cage? Organizational change and isomorphic pressures in the public sector. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 19(1), pp.165–187.
- Azis, M.I., 2016. *Analisis Perbedaan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul*. Universitas Gadjah Mada.
- Bastian, I., 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* 3rd ed., Jakarta: Erlangga.
- Batubara, A.H., 2006. Pelayanan Publik Sebagai Pintu Masuk dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan*, 3(2).
- Boyle, R., 2000. Performance Measurement In Local Government. In *Conference of Peripheral Maritime Regions*. pp. 1–43.
- Bryson, J.M., 2011. *Strategic Planning For Public and Nonprofit Organizations* 4th ed., San Francisco: Jossey-Bass.
- Creswell, J.W., 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* 4th ed., USA: SAGE Publication.

- DiMaggio, P.J. & Powell, W.W., 1983. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality In Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2), pp.147–160.
- Friedman, M., 2009. *Trying Hard Is Not Good Enough* 1st ed., Booksurge Publishing.
- Friedman, M., DeLapp, L. & Watson, S., 2001. The Results and Performance Accountability Implementation Guide: Questions and Answers about How to Do the Work. www.raguide.org.
- Gianakis, G.A., 2002. The Promise Of Public Sector Performance Measurement: Anodyne Or Placebo ? *Public Administration Quarterly*, 26(1).
- Guba, E.G. & Lincoln, Y.S., 1985. Fourth Generation Evaluation as an Alternative. *Educational Horizons*, 63(4), pp.139–141.
- Hennink, M., Hutter, I. & Bailey, A., 2012. *Qualitative Research Methods*, Washington: SAGE Publication.
- Julnes, P. de L. & Holzer, M., 2001. Promoting the Utilization of Performance Measures in Public Organizations: An Empirical Study of Factors Affecting Adoption and Implementation. *Public Administration Review*, 61(6), pp.693–708.
- Kellogg, W.K., 2004. *Logic Model Development Guide*, Battle Creek, Michigan.
- Kerzner, H., 2001. *Strategic Planning for Project Management Using a Project Management Maturity Model*, New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Knowlton, L.W. & Phillips, C.C., 2013. *The Logic Model Guidebook* 2nd ed., California: SAGE Publication.
- Longo, P.J., 2002. The Performance Blueprint: An Integrated Logic Model Developed to Enhance Performance Measurement Literacy: The Case of Performance-Based Contract Management. In *2002 Annual Conference of the American Evaluation Association*.
- Mahmudi, 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik 2*, ed., Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik* 4th ed., Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mardiasmo, 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2.

- McCoy, M. & Hargie, O.D.W., 2001. Evaluating evaluation: implications for assessing quality. *International Journal of Health Care Quality Assurance*, 14(6-7), pp.317-327.
- Meyer, J.W. & Rowan, B., 1977. Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), pp.340-363.
- Nasir, M., 2010. Perubahan Sistem Penganggaran di Indonesia dan dampaknya pada Kinerja. *Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Nurkhamid, M., 2008. Implementasi Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 3(1), pp.45-75.
- Rizka, L. & Handayani, N., 2014. Implementasi Reformasi Birokrasi terhadap Kinerja Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 3(4), pp.1-16.
- Sadjiarto, A., 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 2(2), pp.138-150.
- Safrijal, Basyah, M.N. & Ali, H., 2016. Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance oleh Aparatur Pelayanan Publik di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 1, pp.176-191.
- Sari, I.P., 2015. *Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Sleman)*. Universitas Gadjah Mada.
- Sihaloho, F.L. & Halim, A., 2005. Pengaruh Faktor-Faktor Rasional, Politik dan Kultur Organisasi Terhadap Pemanfaatan Informasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*, (September).
- Sofyani, H. & Akbar, R., 2013. Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Pemerintah Daerah. , 10(2), pp.184-205.
- Sofyani, H. & Akbar, R., 2015. Hubungan Karakteristik Pegawai Pemerintah Daerah Dan Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja : *Jaai*, 19(2), pp.153-173.
- Speklé, R.F. & Verbeeten, F.H.M.M., 2009. The use of performance measurement systems in the public sector: Effects on performance. *Nyenrode Research & Innovation Institute (NRI) Research Paper*, 9-8(2), pp.131-146.

- Syachbrani, W. & Akbar, R., 2013. Faktor-Faktor Teknis dan Keorganisasian yang Memengaruhi Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), pp.447–464.
- UNDP, 1997. *Governance for Sustainable Human Development - Human Development Report 1997*, New York.
- Utomo, E.W., 2015. *Evaluasi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan Pendekatan Model Logika (Studi pada Pemerintah Kota Tarakan)*. Universitas Gadjah Mada.
- Wijaya, A.H.C. & Akbar, R., 2013. The Influence of Information , Organizational Objectives and Targets , and External Pressure Towards The Adoption of Performance Measurement System in Public Sector. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 28(1), pp.62–83.
- Wirawan, 2011. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yin, R.K., 2009. *Case Study Research: Design and Methods* 4th ed., California: SAGE Publication.
- _____, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme*
- _____, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*
- _____, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*
- _____, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*
- _____, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- _____, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan*
- _____, *Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019*
- _____, *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*

- _____, *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*
- _____, *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- _____, *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 196/PMK.02/2015 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran*
- _____, *Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-239/PB/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2015-2019*